

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan berbagai bentuk keberagaman, seperti ragam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan berbagai pandangan hidup yang beragam pula. Karena keberagaman tersebut menjadi bagian integral dari Indonesia, sebuah tujuan terbentuk yakni mewujudkan perbedaan dalam persatuan, yang sering diungkapkan melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Namun dalam mencapai kesatuan dan persatuan di tengah perbedaan dan keberagaman yang ada bukanlah hal yang mudah. Terkadang, kerukunan dan perdamaian tidak selalu terjaga dengan baik di tengah masyarakat. Fenomena ini mungkin timbul karena kurangnya penghargaan terhadap perbedaan, mengindikasikan bahwa dalam perjalanan menuju cita-cita bangsa tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam mencapai tujuan bersatu dan berdampingan dengan harmoni, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami nilai-nilai keragaman dan mempromosikan rasa saling menghargai serta kerukunan di antara lapisan semua masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan semangat “Bhineka Tunggal Ika” dengan lebih kuat dan merajut persatuan yang kokoh di tengah keanekaragaman yang dimilikinya.¹

¹ Muawanah. "Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleransi Di Masyarakat", (*Jurnal Vijjacariya*, Vol. 5, No. 1, 2018), h. 1–23.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diharapkan seluruh warga negara Indonesia mampu bersinergi untuk mencapai tujuan negara, sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah telah memberikan langkah-langkah baru dalam upaya untuk menjaga stabilitas kesejahteraan penduduknya salah satunya adalah melalui dunia pendidikan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi yang terampil, berpengetahuan, dan memiliki wawasan yang laus. Dengan mendukung system pendidikan yang berkualitas, pemerintah berupaya memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah ini mencakup perkembangan kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang memadai, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Melalui pendidikan yang berkualitas, diharapkan generasi muda Indonesia akan siap menghadapi tantangan masa depan dan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Dengan adanya kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, pendidikan, orang tua, dan masyarakat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi pendidikan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki peran penting. Sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 20 pasal 3 Tahun 2003. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu dan membentuk karakter serta perbedaan bangsa yang berbudaya tinggi, upaya meningkatkan kecerdasan nasional. Pendidikan juga bertujuan untuk

menggali potensi peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, kesehatan yang baik, pengetahuan yang luas, keterampilan yang mumpuni, kreatifitas, kemadirian, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mencerminkan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta membangun fondasi yang kuat untuk keberlangsungan negara².

Pendidikan adalah usaha untuk membantu generasi bangsa dalam mengasah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dengan tujuan agar kemampuan tersebut dapat berguna bagi individu dan kehidupan berkomunitas, berserikat, dan berbangsa. Pendidikan memiliki peran kunci dalam mengubah manusia tidak hanya dalam hal kecerdasan, tetapi juga dalam aspek moral, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu pentingnya fokus pada sector pendidikan bagi suatu bangsa menjadi sangat nyata. Dunia pendidikan memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan suatu negara. Jika suatu negara mampu mengelola dengan baik dan tepat, maka negara tersebut cenderung mengalami kemajuan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan yang berkualitas menghasilkan SDM yang unggul yang pada gilirannya dapat berkontribusi dalam memajukan negara. Sebaliknya jika suatu negara tidak mampu

² UUD RI. No. 41. *Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 2003, h. 1–5.

mengembangkan dan mengelola dengan baik, generasi penerusnya akan mengalami keterbatasan dalam membawa perubahan positif. Oleh karena itu, perhatian terhadap sektor pendidikan menjadi sangat krusial. Kualitas pendidikan akan mampu mempengaruhi kemampuan generasi mendatang dalam membangun dan mengembangkan negara serta menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa.

Lembaga pendidikan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa melalui proses pembelajaran. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, guru memiliki tanggung jawab yang lebih sekedar menyampaikan informasi, mereka juga berperan mentransformasikan nilai-nilai. Artinya setiap kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan perkembangan peserta didik dan lingkungan mereka, sehingga peserta didik mampu memahami, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai moral, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan secara berkesinambungan. Dalam upaya membentuk karakter melalui pendidikan peran seorang kepala sekolah juga sangat penting. Kepala sekolah harus bekerja sama dengan para guru dan staf pendidikan lainnya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang tepat. Kolaborasi memastikan bahwa semua elemen lembaga pendidikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter yang positif pada peserta didik. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter generasi muda. Proses ini tidak hanya melibatkan guru dalam memberikan pelajaran, tetapi juga

kepala sekolah dan semua staf pendidikan dalam memberikan arahan, bimbingan, serta lingkungan yang mendukung. Upaya bersama ini akan membantu menciptakan generasi penerus yang memiliki karakter kokoh dan siap untuk berkontribusi secara positif dalam membangun bangsa Indonesia.

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada pemimpinnya, yaitu kepala sekolah. Seorang kepala sekolah memiliki peran penting dalam memberikan arahan kepada semua anggota tim di dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama, terutama tujuan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena tuntutan dan tanggung jawab yang besar dalam mengemban peran ini. Keberhasilan sebuah sekolah bisa dilihat dari cara kepala sekolah berperilaku dan berinteraksi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kewibawaan, sifat, keterampilan, perilaku, serta fleksibilitas kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus mampu menjalankan perannya sebagai manajer dengan baik, yakni mampu merinci dan mengimplementasikan tugas dan fungsi pendidikan dengan lebih rinci. Tujuannya adalah untuk membuat tujuan pendidikan menjadi lebih sederhana dan dapat dijalankan³.

Dalam kehidupan sehari-hari, kepala sekolah sering dihadapkan pada berbagai sikap yang dimiliki oleh para guru, staf dan para siswa yang berasal dari latar belakang kehidupan yang beragam. Perbedaan dalam

³ Muhammad Djafar Saidi. *Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual*, (Salemba Medika, 2011), h. 1-46.

kepentingan dan tingkat sosial budaya bisa menyebabkan terjadinya konflik antara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, penting bagi setiap sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek kognitif dalam pendidikan, tetapi juga memperhatikan aspek sikap dan keterampilan. Dalam aspek kognitif, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas. Dari segi aspek psikomotor atau keterampilan, pendidikan di Indonesia menekankan pada pengembangan keterampilan yang berguna bagi individu dan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif aspek sikap, tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendiknas) merumuskan 18 nilai karakter bangsa Indonesia, termasuk diantaranya adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, mengharga prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.⁴ Dengan demikian melihat dari perumusan kemendiknas tersebut maka salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di Indonesia adalah sikap toleransi dan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Siti Kulsum Marahma. *Peran Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Sikap Toleransi Beragama Di SMAN 1 Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil*, (Islam Negeri Ar-Raniriy Darusalam Banda Aceh, 2020), h. 5.

Istilah toleransi memiliki akar kata dalam bahasa Latin, yaitu dari kata “*Tolarare*”, yang mengandung makna membiarkan sesuatu dengan sabar. Secara umum, toleransi merujuk pada perilaku atau sikap manusia yang tidak melanggar aturan, dimana individu menghormati dan menghargai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain⁵. Penelitian ini dimulai dengan pentingnya menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi keagamaan (*Human Religious*). Konsep beragama memiliki tujuan mendorong manusia untuk mengembangkan sisi kemanusiaannya. Tujuan beragama adalah untuk menciptakan keteraturan, arah, kontrol, dan manajemen yang baik dalam kehidupan, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan yang diridhoi oleh Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), yang dijalankan melalui pelaksanaan ibadah ritual. Ibadah ritual ini merupakan aktivitas keagamaan yang juga memiliki dampak sosial, dan menjadi hak individu yang memiliki signifikansi dalam masyarakat. Praktik tidak hanya diatur oleh panduan ibadah dalam kitab suci masing-masing agama, tetapi juga diatur oleh perundang-undangan negara, organisasi sosial agama, dan kelompok aliran tertentu. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan agamawi, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial. Negara turut berperan dalam mengatur aspek-aspek tertentu terkait praktek ibadah guna menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini

⁵ Eko Digdoyo. *Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media*, (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.1, 2018), h. 42–59.

mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara dimensi agama, hukum, dan sosial dalam pelaksanaan ibadah manusia.

Dalam konteks lebih lanjut, terlihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingka keragaman yang sangat kompleks, termasuk dalam hal keyakinan atau aliran kepercayaan. Dalam keberagaman ini, Indonesia dikenal sebagai masyarakat multiagama⁶. Artinya bangsa Indonesia menjadi rumah bagi berbagai agama, keyakinan, dan aliran kepercayaan yang beranekaragam. Keanekaragaman ini mencakup agama-agama utama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, serta keberagaman aliran kepercayaan tradisional dan lokal. Keragaman ini mencerminkan pluralitas dan harmoni antara berbagai kelompok keagamaan di Indonesia. Namun dengan memiliki banyaknya keanekaragaman seperti agama, aliran, faham, dan gerakan organisasi keagamaan lainnya seringkali menghasilkan perbedaan dalam prinsip dan pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan. Perbedaan ini dapat mengakibatkan sentimen yang kuat diantara pengikut aliran masing-masing. Perbedaan prinsip dalam menjalankan kegiatan ritual keagamaan dapat berkaitan dengan interpretasi terhadap ajaran agama, pandangan tentang tata cara beribadah, atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masing-masing kelompok. Sentiment kuat muncul ketika keyakinan dan nilai-nilai ini dianggap sangat penting oleh kelompok

⁶ Eko Digdoyo. *Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media*, (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.1, 2018), h. 60 .

tersebut, dan perbedaan dengan kelompok lain dapat memicu perasaan pertentangan atau keterasingan.

Oleh karenanya dari sentimen fanatisme yang berlebihan terhadap suatu aliran kepercayaan, paham, atau gerakan keagamaan di Indonesia sering kali menjadi konflik pemicu sosial, baik itu dalam dimensi vertikal (diantara berbagai lapisan masyarakat) maupun horizontal (diantara kelompok sejenis). Dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia, situasi pluralitas telah membawa hasil kolaborasi yang indah dalam bentuk berbagai karakter budaya yang kaya dengan keberagaman. Pluralitas di Indonesia memberikan kesempatan bagi berbagai suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, dan kelompok untuk hidup berdampingan dengan harmoni. Semua elemen masyarakat ini dapat menemukan ruang untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan saling memahami dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi sendiri adalah konsep yang mendasar dalam dinamika ini, toleransi tidak hanya berarti membiarkan perbedaan ada tetapi juga membangun pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Ketika suatu individu dan kelompok mampu menghormati dan menghargai keberagaman, itu nantinya akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif. Upaya tersebut untuk meredam fanatisme, mendorong dialog antara agama, membangun pemahaman lintas kelompok, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi akan membantu menjaga keberlanjutan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Sebagai negeri di katulistiwa, yang memiliki keindahan alam dan budaya yang menjadi saksi bagi dunia internasional. Namun, kesedihan muncul ketika keindahan ini tercabik-cabik oleh sikap eksklusif yang tumbuh dari pandangan sempit mengenai keragaman suku, agama, ras, dan kelompok tertentu. Pandangan yang terkait dengan primordialisme yang sempit ini sering kali memicu konflik, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama, etnis, bahasa, ekonomi dan politik. Konflik yang disebabkan oleh pandangan eksklusif ini tidak hanya mengganggu perdamaian dan harmoni sosial, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan perkembangan negara. Dalam masyarakat yang memiliki keragaman seperti Indonesia, penting untuk mengatasi pandangan sempit dan merangkul nilai-nilai inklusif, toleransi, dan saling menghormati. Pendidikan, dialog antara kelompok, pemahaman terhadap nilai-nilai universal serta peran pemerintah dan pemimpin masyarakat dalam mempromosikan kerukunan dapat membantu meredam konflik dalam memajukan bangsa menuju perkembangan yang berkelanjutan

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, baik dalam eskalasi besar maupun kecil telah mengakibatkan kerugian dalam bentuk korban jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan aspek lainnya. Hal ini telah menyebabkan kerusakan pada jalinan kemanusiaan dan rasa kebangsaan Indonesia. tampaknya, gejala kerusuhan telah menjadi peristiwa umum dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. sejak dari tahun 1996, telah tercatat beberapa kali peristiwa konflik dengan nuansa sosial-

agama, termasuk kerusuhan di beberapa wilayah. Beberapa kerusuhan yang terjadi seperti di Tasikmalaya pada 26 desember 1996, di Karawang pada tahun 1997, serta tragedy Mei yang berlangsung pada tanggal 13-17 Mei 1998. Tragedi tersebut melibatkan berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Medan Ambon, Maluku, NTT, Jawa Timur (Situbondo), Jawa Tengah (Temanggung), Yogyakarta , Jawa Barat (Cirebon), Banten, DKI Jakarta, dan peristiwa-peristiwa kerusuhan lainnya⁷.

Intoleransi menjadi ancaman yang sangat serius saat ini bagi keragaman suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Intoleransi di Indonesia di tuding sebagai masalah agama, sosial, politik, pendidikan dan nasionalisme. Intoleransi dapat dianggap sebagai pemantik radikalisme di tengah-tengah keragaman bangsa Indonesia, sehingga tindakan intoleransi di lingkungan pendidikan kembali terjadi.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan telah menerima laporan mengenai kejadian di SMKN 2 Padang Sumatera Barat yang menjadi viral baru-baru ini yang menggegerkan publik dengan adanya berita siswi berinisial JCH menolak pakai kerudung sebagaimana yang diatur oleh pihak SMKN 2 Padang, dengan alasan karena siswi tersebut bukan agama islam, dari kejadian ini terungkap juga ada 46 siswi nonmuslim yang berjilbab dalam lembaga pendidikan tersebut, Rusmadi selaku kepala sekolah sudah

⁷ Eko Digdoyo. *Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media*, (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.1, 2018), h. 35.

sampaikan permintaan maafnya. Namun bukan hanya itu saja peneliti juga mendapatkan beberapa sumber data dari Tagar.Id yang melaporkan beberapa kejadian intoleransi yang kembali terjadi dalam lembaga pendidikan diantaranya, pada bulan juli 2017 dengan inisial NWA seorang pelajar nonmuslim diwajibkan memakai jilbab dan mengikuti keagamaan oleh pihak SMPN 3 Genteng Banyuwangi. Namun bupati Banyuwangi Abdullah Azhar Anas langsung menindak tegas kepala sekolah, sementara NWA memilih pindah ke SMPN 1 Genteng. Pada bulan juni 2019 dalam sebuah surat edaran, SDN Karangtengah III Wonosari mewajibkan siswa/I baru tahun ajaran 2019/2020 untuk mengenakan seragam muslim., namun surat edaran tersebut kemudian direvisi setelah setelah berkordinasi dengan pihak Disdikpora. Selanjutnya pada bulan desember masih pada tahun 2019 orangtua murid memprotes pihak SD Inpres 22 Manokwari yang mempunyai aturan larangan jilbab untuk siswi saat jam belajar di kelas, namun kepala sekolah Rosalina Sinaga menyebut, kebijakan tersebut sudah berlaku sejak kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Kemudian pada bulan januari 2020 intoleransi kembali terjadi dimana siswi SMAN 1 Gemolong Sragen berinisial Z ditetor oleh seorang pengurus rohis. Siswi tersebut mendapat pesan berbunyi intoleransi hingga penghinaan terhadap orangtua. Namun kasus ini ditanggapi gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beliau langsung meminta dinas terkait untuk menindaklanjutinya.

Sehingga adanya kasus seperti diatas dapat kita lihat bahwasannya intoleransi masih begitu marak dalam lembaga pendidikan⁸.

Oleh karena itu, isu mengenai kerukunan antara umat beragama, budaya, dan aliran kepercayaan, baik dalam skala lokal maupun nasional, merupakan masalah yang sangat serius dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Perhatian yang sungguh-sungguh perlu diberikan oleh semua pihak terlibat. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, terutama jika kita merujuk pada dasar ideologi bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan kepada warganya untuk memiliki keyakinan pada Tuhan. Karenannya, jika konflik yang di picu oleh perbedaan agama terus terjadi, hal ini berpotensi mengancam nilai-nilai serta stabilitas masyarakat. Kerusakan yang melatar belakang agama bisa berdampak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, mengancam keberagaman budaya, dan mengganggu tatanan sosial yang selama ini sudah terbina dengan baik. Untuk menjaga keutuhan dan harmoni masyarakat, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mempromosikan pemahaman antara agama dan kepercayaan. Sehingga dalam hal ini salah satu wadah untuk dapat membina karakter masyarakat bangsa Indonesia adalah melalui dunia pendidikan, agar selalu ikut mengambil peran dalam mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang mampu memahami akan keanekaragaman serta pluralitas yang ada dalam

⁸ Regita Setiawan P. "5 Kasus Intoleransi Pada Lingkungan Sekolah Indonesia" *Tagar.Id*, 2021.

berkehidupan, khususnya setelah mereka berada di lingkungan masyarakat nantinya.

Dengan melihat dari data serta kasus yang telah terjadi di atas yang ditemukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam bersikap toleransi terhadap keberagaman yang ada, sehingga pentingnya untuk menguatkan pendidikan toleransi di Indonesia karena sebagai salah satu aspek preventif dalam mencegah sikap intoleransi di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Sekolah menjadi tempat peserta didik bergaul dan berinteraksi sesamanya, baik dalam perbedaan suku, ras, bahasa dan agama. Berkaitan dengan sebuah lembaga pendidikan yakni SMP Santo Yusup Pacet yang memiliki perbedaan agama dalam satu naungan yaitu agama islam, agama Katolik, dan agama Kristen, namun karena mayoritas penduduk di sekitar sekolah tersebut adalah beragama islam jadi hanya beberapa persen saja siswa-siswi ataupun tenaga pendidik non muslim yang berada dalam naungan di sekolah tersebut. Dari data yang didapatkan peneliti bahwasanya jumlah tenaga pendidik yang beragama Islam di sekolah tersebut sekitar 7 orang, dan yang beragama Kristen 7 orang juga, ditambah dengan karyawan atau staf yang beragama Islam berjumlah 2 orang dan karyawan atau staf yang beragama Katolik sekitar 5 orang.

Sedangkan berkaitan jumlah siswa-siswi di SMP Santo Yusup Pecet pada saat ini yang beragama Islam sekitar 176 siswa, dan yang beragama Kristen sekitar 6 siswa ditambah dengan siswa-siswi yang beragama Katolik sekitar 25 siswa, namun pada tahun sebelumnya ada siswa yang beragama Hindu yang sempat bersekolah disana sampai menjadi alumni. Sehingga dari data keseluruhan siswa-siswi SMP Santo Yusup Pacet yang peneliti dapatkan adalah 207 siswa, namun apabila dijumlahkan secara menyeluruh beserta dengan tenaga pendidiknya berjumlah 226.

Berdasarkan dari hasil obsevasi dan wawancara serta studi dokumentasi di SMP Santo Yusup Pacet dengan melihat perbedaan agama di sekolah tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik, perselisihan, dan kesalahpahaman apabila tidak adanya peran yang baik dari seorang pemimpin dalam membina sikap toleransi antar umat beragama di sekolah tersebut.

Namun peneliti telah menemukan suatu fenomena bahwa sikap toleransi di dalam lembaga pendidikan tersebut sangat baik, dimana kepala sekolah mempunyai sebuah konsep pembinaan dengan cara berinteraksi dan selalu mengingatkan agar saling menjaga rasa toleransi yaitu dengan kata “*Servite et Amate*” yakni layanilah dan cintailah, sehingga dengan adanya penerapan pembinaan dengan bahasa tersebut seluruh warga sekolah yang ada didalamnya harus benar-benar mngembangkan serta melaksanakannya oleh setiap warga sekolah yang ada di lingkungan SMP Santo Yusup Pacet. Misal salah satu contoh dari penerapan pembinaan sikap toleransi “*Servite*

et Amate” yakni Setiap harinya para siswa-siswi mempunyai kegiatan agamanya masing-masing yang langsung di pandu dengan guru agama yang sudah ahlinya. Dengan kegiatan rutinitas demikian siswa-siswi diharapkan bisa mengetahui serta memahami tentang pendidikan agama yang lebih jauh lagi dari sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan yaitu membaca doa-doa, membaca surat-surat pendek, Kunjungan, khotmil quran, siraman rohani, ibadat, dan lain sebagainya. Hal demikian selaras dengan visi sekolah tersebut yakni komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela, dan misinya terpuji dalam pribadi, teruji dalam prestasi. Interaksi sosial yang terjadi di sekolah tersebut berjalan dengan baik, yakni dengan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang ada sehingga keadaan sekolah menjadi rukun dan kondusif, hal demikian tidak lepas juga dari peranan seorang pemimpin (*Leader*) yakni kepala sekolah selalu melakukan pembinaan dengan program rapat evaluasi dengan para guru dan staf, agar sama-sama membimbing para peserta didik dalam membangun sikap toleransi mereka didalam lembaga pendidikan tersebut.

Selain dari program yang dijelaskan diatas ada kebijakan lain yang dilakukan kepala sekolah dan kebijakan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan agar membangun jiwa toleransi yang baik antar warga sekolah, yakni program pembiasaan, program pembelajaran dan melalui program ekstrakurikuler (pramuka), salah satu contoh dalam program pembiasaan

seperti dalam kegiatan keagamaan misalnya apabila memasuki bulan perayaan hari besar agama islam para peserta didik, guru dan staf yang nonmuslim ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, serta diwajibkan untuk mereka mengikutinya karena kepala sekolah sendiri membiarkan akan kebebasan setiap hak individu yang ada dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Begitupun sebaliknya peserta didik yang beragama Katolik dan Kristen apabila ada kegiatan hari besar keagamaan mereka, maka peserta didik, guru dan staf yang muslim diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk saling menghargai dan menjunjung tinggi akan perbedaan yang ada. Rasa kerjasama tersebut di tunjukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Oleh sebab itu berdasarkan fakta yang di amati oleh peneliti di SMP Santo Yusup Pacet, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembinaan sikap toleransi beragama di sekolah tersebut, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah sebagai *Lader* dalam pembinaan sikap toleransi beragama di sekolah tersebut, dengan judul penelitian yang di angkat oleh peneliti yakni **“Peran Kepala Sekolah Sebagai *Leader* Dalam Pembinaan Sikap Toleransi Beragama di SMP Santo Yusup Pacet”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dari latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka peneliti dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai *Leader* dalam pembinaan sikap toleransi beragama di SMP Santo Yusup Pacet?
2. Bagaimana bentuk pembinaan kepala sekolah sebagai *Leader* dalam membangun sikap toleransi beragama di SMP Santo Yusup Pacet?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah sebagai *Leader* dalam pembinaan sikap toleransi beragama di SMP Santo Yusup Pacet.
2. Untuk menegetahui bagaimana pembinaan kepala sekolah sebagai *Leader* dalam membangun sikap toleransi beragama di SMP Santo Yusup Pacet.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan sikap toleransi beragama kepada setiap warga sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran yang lebih produktif demi terbentuknya peserta didik yang beradaptasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang penuh dengan perbedaan.

b. Bagi Kepala Sekolah

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membina sikap toleransi beragama di lingkungan sekolah yang akan terus dilakukan secara berkesinambungan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait tentang ilmu bagaimana peran kepala sekolah sebagai seorang *Leder* dalam pembinaan sikap toleransi beragama didalam lembaga pendidikan.